

STRATEGI DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENANGANAN DAMPAK KERUSAKAN EKOSISTEM MANGROVE DI KAMPUNG MAIBO, DISTRIK AIMAS KABUPATEN SORONG

Nur Azizah Ramadani¹⁾, Yoga Andriyan²⁾, Edy Supardi³⁾

^{1,2,3} Ilmu Pemerintahan, Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, Sorong, Papua Barat
Daya, Indonesia

E-mail Koresponden: nurazizahramadani15@gmail.com

Abstrak

Kerusakan ekosistem mangrove merupakan permasalahan lingkungan yang berdampak terhadap menurunnya fungsi ekologis serta kondisi sosial ekonomi masyarakat pesisir, termasuk di Kampung Maibo, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dalam menangani dampak kerusakan ekosistem mangrove di Kampung Maibo. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan melibatkan pihak DLH serta masyarakat Kampung Maibo sebagai informan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerusakan ekosistem mangrove disebabkan oleh faktor alam dan aktivitas manusia, terutama penebangan mangrove secara berlebihan. Dampak kerusakan dirasakan pada menurunnya hasil tangkapan masyarakat, abrasi pantai, dan berkurangnya fungsi ekologis mangrove. Strategi yang dilakukan DLH meliputi penanaman kembali mangrove, sosialisasi dan edukasi lingkungan, serta monitoring dan evaluasi kegiatan rehabilitasi mangrove. Dalam implementasinya, strategi tersebut melibatkan partisipasi masyarakat dan kerja sama dengan berbagai pihak. Berdasarkan teori strategi Geoff Mulgan, strategi DLH telah mencakup aspek tujuan, lingkungan, arahan, dan pembelajaran, namun masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan lahan, pencurian bibit mangrove, rendahnya kesadaran masyarakat, serta faktor lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan strategi yang lebih adaptif, berkelanjutan, dan terintegrasi guna menjaga kelestarian ekosistem mangrove di Kampung Maibo.

Kata kunci: Strategi, Dinas Lingkungan Hidup, Kerusakan Mangrove, Kampung Maibo.

Abstract

The degradation of the mangrove ecosystem is an environmental issue that impacts the decline of ecological functions and the socio-economic conditions of coastal communities, including in Maibo Village, Aimas District, Sorong Regency. This research aims to analyze the strategies of the Environmental Agency in addressing the impacts of mangrove ecosystem damage in Kampung Maibo. The research uses a qualitative method with a descriptive approach. Data collection techniques were carried out thru interviews, observations, and documentation involving the Environmental Agency and the community of Kampung Maibo as research informants. The research results show that the damage to the mangrove ecosystem is caused by natural factors and human activities, especially excessive mangrove logging. The impact of the damage is felt in the decline of community catch yields, coastal erosion, and the reduction of mangrove ecological functions. The strategies implemented by the Environmental Agency include replanting mangroves, environmental socialization and education, as well as monitoring and evaluating mangrove rehabilitation activities. In its implementation, the strategy involves community participation and cooperation with various parties. Based on Geoff Mulgan's strategy theory, the Environmental Agency strategy has encompassed aspects of goals, environment, direction, and learning, but still faces obstacles such as land limitations, theft of mangrove seedlings, low community awareness, and environmental factors. Therefore, there is a need to strengthen strategies that are more adaptive, sustainable, and integrated to preserve the mangrove ecosystem in Kampung Maibo.

Key words: Strategy, Environmental Agency, Mangrove Damage, Maibo Village.

Article History:

Received : 2026-04-04

Revised : 2026-05-04

Accepted : 2026-06-30

PENDAHULUAN

Ekosistem mangrove merupakan salah satu ekosistem pesisir yang memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan mendukung kehidupan masyarakat pesisir. Mangrove berfungsi sebagai pelindung alami pantai dari abrasi, pengendali intrusi air laut, habitat berbagai jenis biota perairan, serta penyerap karbon yang efektif dalam mitigasi perubahan iklim. Selain memiliki fungsi ekologis, mangrove juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat melalui pemanfaatan hasil perikanan, kepiting, kerang, serta hasil hutan lainnya (Juhri Agus Tan & Hakim Siregar, 2021). Oleh karena itu, keberadaan ekosistem mangrove memiliki nilai strategis yang perlu dijaga dan dikelola secara berkelanjutan agar fungsi ekologis dan ekonominya tetap dapat dirasakan oleh generasi saat ini maupun mendatang.

Indonesia merupakan negara yang memiliki kawasan mangrove terluas di dunia. Menurut Karimah (2017), luas hutan mangrove di Indonesia mencapai sekitar 3,7 juta hektar. Sementara itu, Data Peta Mangrove Nasional Tahun 2023 menunjukkan bahwa sekitar 45% mangrove di Asia dan 20% mangrove dunia berada di Indonesia (Walhi, 2024). Besarnya potensi tersebut menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keberlanjutan ekosistem mangrove. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, berbagai aktivitas manusia yang tidak memperhatikan aspek konservasi telah menyebabkan terjadinya degradasi dan kerusakan mangrove di berbagai wilayah pesisir, sehingga mengancam keberlangsungan fungsi ekologis dan sosial ekonomi yang dimilikinya.

Ekosistem mangrove memiliki peranan yang sangat esensial dalam menjaga keseimbangan wilayah pesisir. Secara ekologis, mangrove berfungsi sebagai pelindung alami pantai dari abrasi, pengendali intrusi air laut, habitat bagi berbagai jenis biota perairan, serta penyerap karbon yang sangat efektif untuk memitigasi perubahan iklim. Selain itu, kawasan ini juga memberikan manfaat ekonomi yang besar bagi masyarakat pesisir yang menggantungkan hidupnya dari hasil perikanan, seperti tangkapan ikan, kepiting, dan kerang.

Indonesia memegang tanggung jawab global yang besar karena memiliki kawasan mangrove terluas di dunia, mencapai sekitar 3,7 juta hektar atau mewakili 20% dari total mangrove dunia. Sayangnya, potensi ini menghadapi ancaman degradasi serius di berbagai daerah. Salah satu wilayah yang terdampak parah adalah Kampung Maibo, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, yang memiliki kawasan pesisir dengan keliling mangrove seluas kurang lebih 4,99 hektar

Salah satu wilayah yang mengalami permasalahan kerusakan mangrove adalah Kampung Maibo, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong. Kampung Maibo merupakan kawasan pesisir yang sebagian besar wilayahnya dikelilingi oleh ekosistem mangrove dengan luas sekitar 4,99 hektar dan menjadi sumber penghidupan utama bagi masyarakat setempat (Aurellia Putri Shenita, 2024). Sebagian besar masyarakat memanfaatkan kawasan mangrove untuk menangkap ikan, kepiting, dan organisme laut lainnya, serta memanfaatkan kayu mangrove untuk kebutuhan rumah tangga maupun ekonomi. Tingginya ketergantungan masyarakat terhadap sumber daya mangrove mengakibatkan terjadinya eksploitasi yang cukup intensif, seperti penebangan pohon mangrove dan pengambilan batu karang secara terus-menerus (Safwan, 2021). Aktivitas tersebut menjadi salah satu faktor utama penyebab kerusakan ekosistem mangrove di Kampung Maibo.

Selain disebabkan oleh aktivitas manusia, kerusakan ekosistem mangrove di Kampung Maibo juga dipengaruhi oleh faktor alam seperti abrasi pantai, gelombang laut, dan kenaikan muka air laut akibat perubahan iklim. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM), kawasan mangrove di Kampung Maibo termasuk dalam kategori kawasan mangrove kritis yang memerlukan upaya rehabilitasi dan pemulihan secara berkelanjutan (Hidayah et al., 2023). Kondisi tersebut berdampak pada menurunnya fungsi ekologis mangrove sebagai pelindung pantai, berkurangnya habitat berbagai biota laut, serta menurunnya hasil tangkapan masyarakat yang bergantung pada sumber daya pesisir.

Kerusakan ekosistem di Kampung Maibo dipicu oleh tingginya ketergantungan masyarakat setempat terhadap sumber daya tersebut, yang berujung pada eksploitasi intensif berupa penebangan pohon mangrove dan pengambilan batu karang secara terus-menerus untuk kebutuhan rumah tangga maupun komersial. Kondisi ini semakin diperparah oleh

tekanan alam seperti abrasi pantai, hantaman gelombang laut, dan kenaikan muka air akibat perubahan iklim. Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM), kawasan mangrove di Kampung Maibo kini dikategorikan sebagai kawasan kritis yang membutuhkan rehabilitasi segera. Degradasi ini tidak hanya menghilangkan fungsi pelindung alami pantai, tetapi juga secara langsung menurunkan hasil tangkapan nelayan, yang mengancam kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat.

Urgensi dan Peran Pemerintah Daerah Sebagai perpanjangan tangan pemerintah, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sorong memiliki mandat berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 untuk melaksanakan perlindungan, pengendalian, pengawasan, serta rehabilitasi lingkungan yang rusak. Untuk menjamin keberlanjutan fungsi mangrove, diperlukan perencanaan dan strategi publik yang efektif dari DLH, yang menurut pandangan teori Geoff Mulgan harus memenuhi empat aspek utama: tujuan (*purpose*), lingkungan (*environment*), arahan (*direction*), dan pembelajaran (*learning*).

Tujuan Penelitian Melihat kondisi kritis kawasan pesisir tersebut dan pentingnya intervensi pemerintah, penelitian ini mendesak untuk dilakukan guna menganalisis bagaimana strategi yang diimplementasikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sorong dalam menangani kerusakan ekosistem mangrove di Kampung Maibo. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi oleh DLH di lapangan, dengan harapan hasilnya dapat menjadi masukan strategis dalam menyempurnakan program pengelolaan dan pelestarian mangrove yang berkesinambungan.

LITERATURE REVIEW

Strategi

Strategi merupakan suatu proses perencanaan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien. Strategi tidak hanya berorientasi pada tujuan jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan dalam jangka panjang. Dalam organisasi pemerintahan, strategi digunakan sebagai pedoman dalam merumuskan kebijakan dan tindakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Freedman (2013) menjelaskan bahwa strategi merupakan suatu rencana yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu melalui proses pengambilan keputusan yang sistematis. Selain itu, menurut Stephanie K. Marrus dalam Sudiantini dan Hadita (2022), strategi merupakan proses penentuan rencana pemimpin organisasi yang berfokus pada tujuan jangka panjang disertai penyusunan upaya untuk mencapainya.

Menurut Geoff Mulgan dalam *The Art of Public Strategy* (2009), strategi dalam sektor publik harus memperhatikan empat aspek utama yaitu tujuan (*purpose*), lingkungan (*environment*), arahan (*direction*), dan pembelajaran (*learning*). Keempat aspek tersebut menjadi dasar dalam melihat efektivitas strategi yang diterapkan oleh organisasi atau lembaga pemerintahan.

Menurut Geoff Mulgan, strategi dapat dianalisis melalui empat aspek utama yaitu tujuan (*purpose*), lingkungan (*environment*), arahan (*direction*), dan pembelajaran (*learning*). Keempat aspek tersebut menjadi dasar dalam melihat efektivitas suatu strategi yang diterapkan oleh organisasi atau lembaga pemerintahan.

Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) merupakan perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup. Keberadaan DLH menjadi salah satu instrumen pemerintah daerah dalam mewujudkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan melalui perencanaan, pengendalian, pengawasan, serta penegakan kebijakan lingkungan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam melaksanakan berbagai upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk menjamin kelestarian fungsi lingkungan serta mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Dinas Lingkungan Hidup dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. DLH berkedudukan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup sesuai dengan kewenangan daerah. Dalam pelaksanaan tugasnya, DLH dipimpin oleh seorang kepala dinas dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah (Tentang Dinas Lingkungan Hidup, 2021).

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, tugas DLH meliputi perencanaan lingkungan hidup, pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pemeliharaan kualitas lingkungan hidup, pengawasan terhadap kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan, serta penegakan hukum lingkungan. Dalam konteks pengelolaan ekosistem mangrove, DLH memiliki peran penting dalam menyusun kebijakan, melaksanakan rehabilitasi kawasan yang rusak, melakukan sosialisasi kepada masyarakat, serta menjalin kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan guna mendukung upaya pelestarian mangrove.

Berdasarkan teori strategi Geoff Mulgan, peran DLH dalam penanganan kerusakan ekosistem mangrove dapat dianalisis melalui aspek tujuan (*purpose*), lingkungan (*environment*), arahan (*direction*), dan pembelajaran (*learning*). Melalui aspek tersebut, DLH diharapkan mampu merumuskan strategi yang tidak hanya berfokus pada pemulihan kondisi lingkungan, tetapi juga memperhatikan keterlibatan masyarakat serta keberlanjutan pengelolaan ekosistem mangrove dalam jangka panjang. Dengan demikian, keberhasilan penanganan kerusakan mangrove tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga pada kolaborasi antara DLH, masyarakat, dan pihak terkait lainnya.

Ekosistem Mangrove

Ekosistem mangrove merupakan komunitas vegetasi yang tumbuh di wilayah pesisir dan dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Mangrove memiliki fungsi ekologis yang sangat penting sebagai pelindung pantai, habitat biota laut, dan penyeimbang ekosistem pesisir. Selain itu, mangrove juga memberikan manfaat sosial ekonomi bagi masyarakat pesisir.

Menurut Tomlinson (1986), mangrove merupakan komunitas tumbuhan pantai yang tumbuh pada wilayah yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Sementara itu, Kathiresan dan Bingham (2001) menyatakan bahwa ekosistem mangrove merupakan ekosistem khas pesisir yang mampu beradaptasi pada kondisi lingkungan ekstrem dengan kadar salinitas tinggi. Bryan-Brown et al. (2020) menjelaskan bahwa mangrove memiliki peranan penting dalam penyimpanan karbon biru, perlindungan pesisir, serta mendukung keberlangsungan biota laut. Kerusakan ekosistem mangrove dapat disebabkan oleh faktor alam maupun aktivitas manusia. Aktivitas manusia seperti penebangan liar, alih fungsi lahan, dan eksploitasi sumber daya pesisir menjadi penyebab utama menurunnya kualitas mangrove di berbagai daerah.

Penanganan Dampak Kerusakan Ekosistem Mangrove

Penanganan kerusakan mangrove dilakukan melalui upaya rehabilitasi, konservasi, pengawasan, serta pelibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. Rehabilitasi mangrove tidak hanya berfokus pada kegiatan penanaman kembali, tetapi juga mencakup edukasi masyarakat dan penguatan kelembagaan agar pengelolaan mangrove dapat dilakukan secara berkelanjutan.

Alongi (2015) menyatakan bahwa penanganan kerusakan mangrove perlu dilakukan melalui pendekatan rehabilitasi ekosistem, pengelolaan berkelanjutan, dan keterlibatan berbagai pihak terkait. Selain itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menegaskan bahwa rehabilitasi lingkungan merupakan upaya pemulihan terhadap lingkungan yang mengalami kerusakan agar dapat kembali berfungsi sebagaimana mestinya.

Menurut Oktavia, Hakim, dan Aditya (2022), pengelolaan mangrove berbasis masyarakat menjadi salah satu strategi yang efektif dalam menjaga keberlanjutan ekosistem mangrove karena melibatkan masyarakat sebagai bagian dari pengawasan dan pelaksanaan program lingkungan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian dilaksanakan di Kampung Maibo, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong. Informan

penelitian terdiri dari pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sorong dan masyarakat Kampung Maibo. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai kondisi kerusakan mangrove, strategi penanganan yang dilakukan DLH, serta hambatan dalam pelaksanaannya. Observasi dilakukan secara langsung di lokasi penelitian untuk melihat kondisi ekosistem mangrove, sedangkan dokumentasi digunakan sebagai data pendukung penelitian. Teknik analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teori strategi Geoff Mulgan yang meliputi aspek tujuan, lingkungan, arahan, dan pembelajaran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Ekosistem Mangrove di Kampung Maibo

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan di Kampung Maibo, kondisi ekosistem mangrove menunjukkan adanya kerusakan pada beberapa titik kawasan pesisir. Kerusakan tersebut ditandai dengan berkurangnya jumlah vegetasi mangrove, rusaknya struktur perakaran mangrove, serta menurunnya kualitas lingkungan pesisir. Sebagian kawasan mangrove mengalami degradasi akibat aktivitas penebangan yang dilakukan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan kayu bakar, bahan bangunan, maupun kebutuhan ekonomi lainnya. Selain faktor aktivitas manusia, kerusakan mangrove juga dipengaruhi oleh faktor alam berupa abrasi pantai, gelombang laut, dan perubahan kondisi lingkungan pesisir. Kombinasi antara faktor alam dan aktivitas manusia menyebabkan kemampuan mangrove dalam menjalankan fungsi ekologisnya mengalami penurunan. Kondisi ini berdampak terhadap berkurangnya perlindungan alami kawasan pesisir dari ancaman abrasi dan gelombang laut.

Dampak Kerusakan Ekosistem Mangrove

Kerusakan ekosistem mangrove di Kampung Maibo menimbulkan berbagai dampak baik dari aspek lingkungan maupun sosial ekonomi masyarakat. Dari aspek lingkungan, kerusakan mangrove menyebabkan meningkatnya abrasi pantai dan berkurangnya kemampuan kawasan pesisir dalam menahan intrusi air laut. Selain itu, habitat berbagai jenis ikan, kepiting, dan organisme laut lainnya juga mengalami penurunan akibat berkurangnya tutupan vegetasi mangrove.

Dari aspek sosial ekonomi, kerusakan mangrove berpengaruh terhadap mata pencaharian masyarakat yang sebagian besar bergantung pada sumber daya pesisir. Menurunnya populasi ikan dan kepiting menyebabkan hasil tangkapan masyarakat berkurang sehingga berdampak pada pendapatan mereka. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kerusakan mangrove tidak hanya menjadi masalah lingkungan, tetapi juga menjadi permasalahan sosial dan ekonomi bagi masyarakat Kampung Maibo.

Strategi Dinas Lingkungan Hidup dalam penanganan kerusakan mangrove

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sorong telah melakukan berbagai upaya untuk menangani dampak kerusakan ekosistem mangrove di Kampung Maibo.

1. Rehabilitasi dan Penanaman Kembali Mangrove

Upaya utama yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup adalah rehabilitasi kawasan mangrove melalui kegiatan penanaman kembali mangrove pada lokasi yang mengalami kerusakan. Program rehabilitasi dilakukan secara bertahap dengan melibatkan masyarakat, pemerintah kampung, dan instansi terkait. Kegiatan ini bertujuan untuk memulihkan fungsi ekologis mangrove serta mengurangi dampak abrasi yang terjadi di wilayah pesisir.

2. Sosialisasi dan Edukasi Lingkungan

Dinas Lingkungan Hidup juga melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kelestarian ekosistem mangrove. Sosialisasi dilakukan melalui penyuluhan, pertemuan masyarakat, serta kegiatan edukasi lingkungan yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap dampak yang ditimbulkan akibat kerusakan mangrove.

3. Monitoring dan Evaluasi Program

Untuk memastikan keberhasilan program rehabilitasi, Dinas Lingkungan Hidup melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala. Monitoring dilakukan untuk mengetahui tingkat pertumbuhan mangrove yang telah ditanam, sedangkan evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program serta mencari solusi yang tepat guna meningkatkan efektivitas kegiatan rehabilitasi.

Hambatan Dalam Pelaksanaan Strategi

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan penelitian, terdapat beberapa hambatan yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan strategi penanganan kerusakan mangrove. Hambatan tersebut meliputi keterbatasan anggaran, keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap pentingnya menjaga mangrove, serta adanya pencurian bibit mangrove yang telah ditanam. Selain itu, faktor alam seperti gelombang laut dan abrasi juga memengaruhi tingkat keberhasilan rehabilitasi mangrove yang dilakukan.

Berdasarkan hasil penelitian, strategi yang diterapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sorong dalam menangani dampak kerusakan ekosistem mangrove di Kampung Maibo meliputi kegiatan rehabilitasi dan penanaman kembali mangrove, sosialisasi kepada masyarakat, serta monitoring dan evaluasi terhadap program yang telah dilaksanakan. Strategi tersebut menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah untuk memulihkan fungsi ekologis mangrove sekaligus mengurangi dampak lingkungan yang ditimbulkan akibat kerusakan ekosistem pesisir. Kerusakan mangrove yang terjadi di Kampung Maibo tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga memengaruhi kondisi sosial ekonomi masyarakat yang sebagian besar bergantung pada sumber daya pesisir sebagai sumber mata pencaharian. Apabila dianalisis menggunakan teori strategi Geoff Mulgan, strategi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup telah mencerminkan aspek tujuan (purpose) karena berorientasi pada pemulihan ekosistem mangrove dan perlindungan lingkungan pesisir. Tujuan tersebut muncul sebagai respons terhadap kondisi mangrove yang mengalami degradasi akibat aktivitas manusia dan faktor alam. Upaya rehabilitasi mangrove yang dilakukan menunjukkan adanya komitmen pemerintah dalam menjawab kebutuhan masyarakat terhadap lingkungan yang berkelanjutan serta menjaga fungsi mangrove sebagai pelindung alami kawasan pesisir. Selain itu, strategi yang diterapkan juga mempertimbangkan aspek lingkungan (environment), yaitu kondisi masyarakat Kampung Maibo yang masih memiliki ketergantungan tinggi terhadap sumber daya mangrove untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari. Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan program pelestarian mangrove karena keberhasilan strategi sangat dipengaruhi oleh partisipasi dan kesadaran masyarakat. Selanjutnya, aspek arahan (direction) terlihat dari berbagai program yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup sebagai langkah konkret dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Program rehabilitasi mangrove, sosialisasi lingkungan, dan pengawasan kawasan pesisir merupakan bentuk arahan kebijakan yang dilakukan secara terencana untuk mengurangi tingkat kerusakan mangrove. Namun demikian, pelaksanaan program masih menghadapi berbagai hambatan, seperti keterbatasan anggaran, rendahnya kesadaran sebagian masyarakat, serta faktor alam berupa abrasi dan gelombang laut yang memengaruhi tingkat keberhasilan rehabilitasi. Hambatan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan strategi tidak hanya ditentukan oleh kebijakan yang dirumuskan, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dan dukungan dari berbagai pihak yang terlibat.

Selain itu, aspek pembelajaran (learning) juga telah diterapkan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala terhadap program rehabilitasi mangrove. Evaluasi tersebut menjadi sarana bagi Dinas Lingkungan Hidup untuk mengetahui tingkat keberhasilan program serta mengidentifikasi berbagai kendala yang muncul selama pelaksanaan kegiatan. Melalui proses pembelajaran tersebut, Dinas Lingkungan Hidup dapat melakukan penyesuaian dan perbaikan strategi agar lebih efektif dalam menangani kerusakan ekosistem mangrove di masa mendatang. Oleh karena itu, keberhasilan penanganan kerusakan mangrove di Kampung Maibo memerlukan sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya sehingga upaya pelestarian mangrove dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi lingkungan maupun masyarakat pesisir.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kerusakan ekosistem mangrove di Kampung Maibo disebabkan oleh faktor alam dan aktivitas manusia, terutama penebangan mangrove secara berlebihan. Kerusakan tersebut berdampak terhadap kondisi ekologis dan sosial ekonomi masyarakat pesisir. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sorong telah melaksanakan berbagai strategi dalam menangani dampak kerusakan mangrove melalui kegiatan rehabilitasi mangrove, sosialisasi dan edukasi lingkungan, serta monitoring dan evaluasi program. Berdasarkan teori strategi Geoff Mulgan, strategi yang diterapkan telah mencakup aspek tujuan, lingkungan, arahan, dan pembelajaran. Namun demikian, pelaksanaan strategi masih menghadapi berbagai hambatan seperti keterbatasan lahan, faktor lingkungan, pencurian bibit mangrove, serta rendahnya kesadaran masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan strategi yang lebih adaptif dan berkelanjutan melalui peningkatan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait lainnya.

Saran

Dinas Lingkungan Hidup diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap kawasan mangrove serta memperkuat program edukasi lingkungan kepada masyarakat secara berkelanjutan. Selain itu, diperlukan kerja sama yang lebih luas dengan pemerintah kampung, lembaga pendidikan, dan organisasi lingkungan untuk mendukung keberhasilan rehabilitasi mangrove di Kampung Maibo.

Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena hanya berfokus pada strategi Dinas Lingkungan Hidup dalam menangani dampak kerusakan ekosistem mangrove di Kampung Maibo dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji tingkat efektivitas program rehabilitasi mangrove melalui pendekatan kuantitatif atau metode campuran (mixed methods) sehingga dapat mengukur keberhasilan program secara lebih objektif. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat mengembangkan kajian mengenai tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan mangrove, kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam konservasi mangrove, maupun analisis dampak ekonomi dan sosial dari program rehabilitasi mangrove terhadap kesejahteraan masyarakat pesisir. Penelitian yang lebih luas dengan lokasi penelitian yang berbeda juga diperlukan untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai strategi pengelolaan dan pelestarian ekosistem mangrove di Kabupaten Sorong maupun wilayah pesisir lainnya.

Reference

Book

- Alongi, D. M. (2015). *The Impact of Climate Change on Mangrove Forests*. Springer.
- Freedman, L. (2013). *Strategy: A History*. Oxford University Press.
- Mulgan, G. (2009). *The Art of Public Strategy: Mobilizing Power and Knowledge for the Public Good*. Oxford University Press.
- Tomlinson, P. B. (1986). *The Botany of Mangroves*. Cambridge University Press.

Jurnal

- Akram, & Hasnidar. (2022). Pemanfaatan sumber daya mangrove oleh masyarakat pesisir dan dampaknya terhadap keberlanjutan lingkungan. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 20(2), 145–154.
- Andriyan, Y., Rajab, A. M., Hidayat, R., Muhamad, S., & Munzir, M. (2023). Eksistensi Naskah Akademik Dalam Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah. *Jurnal Pemerintahan, Politik Anggaran Dan Adiminstrasi Publik--Coba*, 3(1), 1-18.
- Andriyan, Y., Rajab, A. M., Pamungkas, A. C., Muhamad, S., & Rahakratat, R. (2024). Transformasi E-Government Menuju Good Governance di Pemerintah Kabupaten Sorong. *Samakta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 24-35.
- Andriyan, Y. (2025). Analisis Dasar Green Government Pada Pemerintah Kabupaten Sorong: Kesiapan Daerah Menuju Tata Kelola Hijau. *Jurnal Pemerintahan, Politik Anggaran Dan Adiminstrasi Publik*, 5(2), 443-449.

- Andriyan, Y. (2021). Pengelolaan keuangan daerah di pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2019. *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK)*, 3(1), 47-54.
- Aurellia Putri Shenita. (2024). Analisis kondisi ekosistem mangrove sebagai penunjang kehidupan masyarakat pesisir di Kampung Maibo. *Jurnal Pesisir dan Kelautan*, 12(1), 33-45.
- Bryan-Brown, D., Brown, C. J., Connolly, R. M., & Richards, D. R. (2020). Managing mangrove ecosystems for climate change mitigation and coastal protection. *Marine Policy*, 118, 104023.
- Harefa Suriani Meilinda, dkk. (2024). Faktor-faktor penyebab kerusakan ekosistem mangrove dan dampaknya terhadap masyarakat pesisir. *Jurnal Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan*, 14(1), 55-66.
- Hidayah, N., dkk. (2023). Identifikasi kawasan mangrove kritis sebagai prioritas rehabilitasi di wilayah Papua Barat. *Jurnal Kehutanan Tropika*, 18(2), 112-123.
- Juhri Agus Tan, & Hakim Siregar. (2021). Peran ekosistem mangrove dalam mendukung keberlanjutan lingkungan dan ekonomi masyarakat pesisir. *Jurnal Lingkungan dan Pembangunan*, 5(2), 78-89.
- Karimah. (2017). Peran ekologis dan ekonomis hutan mangrove di Indonesia. *Jurnal Hutan Tropis*, 5(3), 195-203.
- Kathiresan, K., & Bingham, B. L. (2001). Biology of mangroves and mangrove ecosystems. *Advances in Marine Biology*, 40, 81-251.
- Oktavia, R., Hakim, L., & Aditya. (2022). Pengelolaan mangrove berbasis masyarakat sebagai upaya konservasi lingkungan pesisir. *Jurnal Administrasi Publik dan Lingkungan*, 7(1), 23-35.
- Pamungkas, A. C., Andriyan, Y., Rumlus, M. H., & Kalauw, S. M. (2025). Globalisasi dan Desentralisasi dalam Permasalahan Pembangunan di Papua Barat Daya. *JOSH: Journal of Sharia*, 4(02), 1-20.
- Risfany, R., Difinubun, M. I., Andriyan, Y., & Difinubun, Y. (2022). Pengelolaan hutan mangrove berbasis simpanan karbon pada jenis *bruguiera gymnoriza* di desa Waefusi Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan. *Jurnal Aquafish Saintek*, 2(2), 18-30.
- Safwan. (2021). Pemanfaatan sumber daya mangrove oleh masyarakat pesisir Kampung Maibo Kabupaten Sorong. *Jurnal Sosial Pesisir*, 9(2), 87-96.
- Sitepu, dkk. (2024). Dampak kerusakan mangrove terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat pesisir. *Jurnal Ilmu Lingkungan Indonesia*, 22(1), 41-53.
- Supardi, E., Difinubun, M. I., & Muhamad, S. (2022). Analisis Kebijakan: Pengembangan Usaha Sektor Perikanan pada Kawasan Ekonomi Khusus Sorong. *Jurnal Pemerintahan, Politik Anggaran Dan Adiminstrasi Publik--Coba*, 2(1), 10-22.
- Telaumbanua Roy, dkk. (2025). Analisis dampak ekologis dan sosial ekonomi akibat kerusakan mangrove di wilayah pesisir. *Jurnal Ekologi dan Lingkungan*, 11(1), 66-79.